

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11

C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistmatika Penulisan	25
 BAB II ETIKA HUKUM DAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS	
A. Perbedaan antara Etika dan Hukum	27
B. Negara Hukum yang Demokratis.....	36
C. Kedudukan Advokat Dalam Negara Hukum.....	45
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Islam.....	55
 BAB III KEDUDUKAN MK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN	
A. Arti Penting Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Hukum yang Demokratis.....	69
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Ketatanegaraan...79	
C. Judicial Review Dalam Negara Hukum yang Demokratis.....	89
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Data.....	105
B. Latar Belakang yang Mendorong Pemohon Mengajukan Judicial Review Pasal 558 Ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	106

C. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Menolak Judicial Review Pasal 458 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	117
D. Implikasi Adanya Penolakan Pendamping Advokat Dalam Sidang di DKPP...	130

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	137
B. SARAN.....	139

